

## Tradisi Politik Melayu : Analisis Sistem Marga Uluan Dan Iliran Di Sumatera Selatan

Nico Oktario Adytyas<sup>1\*</sup>, M Sirajudin Fikri<sup>2\*</sup>

<sup>1\*</sup>Prodi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah

<sup>2\*</sup>Prodi Politik Islam Fakultas Adab dan Humaniora Universitas Islam Negeri Raden Fatah  
email : nico.oktario\_uin@radenfatah.ac.id

### Abstrak

Tulisan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengurai eksistensi sistem politik tradisional di era modern sekarang, selain itu ingin menelisik lebih dalam tentang bagaimana dikotomis antara masyarakat uluan dan Iliran. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer dan sekunder yang dicari dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan teknik dokumentasi dan kemudian di analisis dengan kebutuhan peneliti akan data yang disajikan dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini dapat ditarik beberapa kesimpulan, dikotomis antara Uluan dan Iliran didasarkan pada pemahaman setiap masyarakat terhadap kebudayaan mereka, pada tahap selanjutnya mempengaruhi kehidupan mereka sehari-hari secara turun temurun. Kedua, adat yang turun menurun diterapkan dalam masyarakat Uluan dan Iliran di dominasi dengan system pemerintahan tradisional dengan implementasi otoritas tradisional dalam suksesor kepemimpinannya, dimana kepala pemerintahan dipilih secara turun temurun. Tahap selanjutnya dalam dinamika system pemerintahan tradisional tidak menanggalkan Negara dan Agama, Oleh karena itu perlu adanya jalan tengah yang tepat guna mengakomodir semua kepentingan. Harus ada sifat saling mengisi antara keduanya Yakni adanya peluang bagi agama untuk mengisi dimensi etis dari kehidupan bernegara dan moralitas agama, sehingga rumusan “Negara Indonesia bukanlah negara agama bukan pula negara sekuler”, tetapi negara yang di dalamnya nilai-nilai agama-agama bisa hidup dan eksis.

**Kata Kunci:** Politik, Tradisional, Uluan, Iliran

### Abstract

*The writing in this study aims to unravel the existence of traditional political system in modern era, besides wanting to investigate more about how dichotomized between uluan and Iliran society. The method used in this research uses qualitative research method with primary and secondary data sources sought by interview data collection techniques, observation and documentation techniques and then in analysis with the researchers' need for data presented in this study. In this study can be drawn some conclusions, the dichotomy between Uluan and Iliran is based on the understanding of each society towards their culture, at a later stage affecting their daily lives hereditary. Second, the declining custom is applied in the Uluan and Iliran communities in domination with the traditional system of government with the implementation of traditional authorities in the succession of leadership, where the head of government is elected hereditary. The next stage in the dynamics of the traditional system of government does not strip away the State and Religion, therefore there needs to be an appropriate middle way to accommodate all interests. There must be a mutually filling nature between the two, namely the opportunity for religion to fill the ethical dimension of state life and religious morality, so that the formulation of "The State of Indonesia is not a religious state nor a secular state", but a country in which the values of religions can live and exist .*

**Keywords:** Politic, Tradicional, Uluan, Iliran

## **A. PENDAHULUAN**

Tulisan ini mengkaji tentang tradisi Politik Melayu yang kaitannya tentang sistem marga dan dinamika perubahan sistem politik tradisional, lokus penelitian ini berada di daerah di Sumatera Selatan yang dianggap merupakan salah satu daerah yang memiliki sejarah panjang Politik lokal dan dinamika yang cukup menarik untuk dibahas. Hal menarik lainnya dalam kajian ini adalah apakah tradisi politik melayu tersebut masih terus terjaga hingga saat ini, atau ada aspek lain yang masih berpengaruh terhadap peta politik di tingkat lokal ataupun cakupan yang lebih luas. Kajian tentang dinamika politik lokal masih menjadi hal yang menarik dibahas dan menjadi salah satu kajian menarik para peneliti dan para akademisi untuk mengelaborasi lebih jauh, terutama perkembangan politik lokal yang menyimpan sejarah panjang dalam perubahan sistem politik yang ada di suatu daerah.

Perkembangan politik lokal dalam berbagai aspek dianggap mengalami dinamika yang cukup beragam, terutama menilik perkembangan terkini tentang kajian Islam, melayu dan banyak hal lain yang sedikit lebihnya berpengaruh pada realita keadaan politik di lapangan.. Luasnya sebaran masyarakat melayu di berbagai daerah sangat memungkinkan sekali untuk membuat identitas-identitas baru yang kadang kala akan melahirkan corak-corak yang berbeda antara satu masyarakat melayu di setiap daerah. Sama halnya apa yang terjadi pada masyarakat melayu di Sumatera Selatan, banyak sekali corak sosial politik yang diciptakan dan ini bisa menjadi menarik dan magnet bagi siapapun untuk menelaah lebih dalam.

Salah satu kajian yang cukup menarik tentang dinamika politik lokal adalah kajian tentang Marga, dalam sistem marga ada proses sistem pemerintahan tradisional yaitu proses pengangkatan dan pemberhentian pemimpin dengan system yang memiliki ke khasan masing-masing dalam setiap daerah. Dinamika yang terjadi dalam proses pengangkatan dan pemberhentian setiap pemimpin tidak lepas dari institusi social politik yang ada di tengah masyarakat. Wujud kehadiran kekuasaan tradisional terefleksikan dalam realita proses pengangkatan dan pergantian suksesi pemimpin. Suksesi kepemimpinan tradisional juga terjadi di Sumatera Selatan yang juga cukup kental akan system pemerintahan tradisional yang pernah hadir di era terdahulu, bahkan ada yang masih eksis di era saat ini dan bukan tidak mungkin berpengaruh atas apa yang terjadi pada dinamika di era pemerintahan lokal saat ini.

Uraian tentang latar belakang dan dinamika politik tradisional dalam penelitian ini diurai dengan menggunakan dua konsep, yang pertama adalah Konsep Max Webber tentang teori kepemimpinan yang erat kaitannya dengan suksesor kepemimpinan, selanjutnya adalah teori

Evolusi Budaya untuk mengurai perubahan masyarakat di setiap era. Teori Evolusi Budaya Koentjaraningrat dalam bukunya *Sejarah Teori Antropologi*, dengan menggunakan istilah evolusi budaya, mengurai secara khusus beberapa teori tentang perubahan budaya. Menurutnya dalam abad ke-19 mulai ada perhatian terhadap kemajuan peradaban manusia, Dalam pandangan proses evolusi sosial universal, semua masyarakat dipandang berevolusi<sup>1</sup>dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang makin lama makin tinggi dan kompleks. Proses berevolusi ini mesti dialami oleh setiap masyarakat di muka bumi ini

Prilaku masyarakat yang dinamis akan mereproduksi berbagai macam produk sosial yang sangat mungkin akan menentukan apa yang terjadi di era saat ini. Dikotomis marga Uluan dan Iliran terkadang menimbulkan berbagai macam masalah, karena ada jurang pembeda yang tercipta ketika hal ini terealisasikan di tengah masyarakat. Perbedaan hal tersebut sangat erat kaitannya dengan perbedaan geografis antara masyarakat Ulu dan Ilir, namun untuk realitas yang ada saat ini terkadang masyarakat Ulu dan Ilir tidak hanya soal masalah geografis semata, namun lebih dari itu dikotomi antara Ulu dan Ilir sudah menciptakan sekat pada ranah yang lebih luas yaitu sosial Politik, dan Ekonomi. Banyak Asumsi mengemuka terkait pembeda antara kedua belah pihak ini, namun dalam penelitian ini tidak akan memperdalam jurang perbedaan yang ada, namun lebih jauh akan berusaha melihat ke khas an yang ada dan tidak menutup kemungkinan akan terlihat bahwa ada kesamaan diantara mereka, sehingga sekat pemisah mungkin bisa sedikit terkikis. Instrument yang tidak dapat ditinggalkan dan dikatakan berpengaruh penuh adalah Islam. Islam mungkin memberikan Kontribusi nyata dalam pertimbangan suatu kebijakan tradisional dengan dasar bahwa Mayoritas Masyarakat Marga Uluan dan Iliran beragama Islam. Namun kebijakan yang diambil tidak selalu mulus dan lancar ada hadangan lain, karena Pemerintahan Tradisional tidak selalu dominan karena harus berhadapan dengan hegemoni pemerintahan pusat. Argumentasi yang dipaparkan di atas menjadi pijakan bagi peneliti untuk melakukan penelitian lebih mendalam tentang dinamika politik lokal yang terjadi di Sumatera Selatan terutama kaitannya dengan beberapa Sample yang mewakili warga Uluan dan Iliran.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

Berbagai alasan dan tujuan tentang penelitian ini telah dijabarkan, untuk lebih memperkuat argumentasi pentingnya penelitian ini adalah perlu adanya kebaruan tentang apa yang dibahas dalam sebuah penelitian, ada beberapa penelitian terdahulu yang dianggap relevan dengan penelitian ini beberapa diantaranya adalah: Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomi Sejarah

---

<sup>1</sup> Bryan S Turner, "Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern," *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2012.

Kultural<sup>2</sup>, selanjutnya adalah *pengelolaan system social Marga di Sumatera Selatan : telaah atas kontribusi Teori Fungsionalisme Strukturalisme Parsons*<sup>3</sup>, Historiografi dan Identitas Ulu di Sumatera Selatan<sup>4</sup>, penelitian selanjutnya dari Din Syamsudin yang membahas tentang “*Islam dan Kepemimpinan Orde baru*”<sup>5</sup>, kemudian penelitian yang berjudul “*Pantun Melayu: Titik Temu Islam dan Budaya Lokal Nusantara*”<sup>6</sup>, karya selanjutnya adalah “*ISLAM DAN POLITIK*”<sup>7</sup>, dan yang terakhir adalah karya Dosen UGM yang berjudul “*Elit Politik Lokal dalam Perubahan Sistem Politik*”<sup>8</sup>. Penelitian sebelumnya yang bertema serupa dan mendekati penelitian ini belum banyak membahas tentang sejarah politik tradisional yang pernah hadir di tengah masyarakat. Maka dari itu celah yang mungkin bisa di isi oleh penelitian ini adalah salah satunya akan membahas tentang kepemimpinan tradisional yang pernah eksis di Sumatera Selatan dan Mencoba untuk mengurai apakah Islam memiliki kontribusi pada eksistensi pemerintahan Tradisional. Aspek lain yang membedakan adalah penggunaan teori Evolusi Budaya untuk mengurai fenomena ini, Teori Evolusi Budaya menerangkan bahwa *Pertama*, teori ini harus memprediksi efek dari struktur yang berbeda dari transmisi budaya pada proses evolusi. *Kedua*, teori ini harus memungkinkan kita untuk memahami kondisi di mana struktur yang berbeda dari transmisi budaya mungkin berkembang (Robert Boyd & Richerso) dalam Batubara<sup>9</sup>

dan selanjutnya adalah penggunaan teori Webber dan evolusi kebudayaan guna mengungkap penelitian ini beda dari penelitian sebelumnya, yang terakhir adalah dalam penelitian ini mencoba menarasikan keterkaitan dan kontribusi islam dan politik Lokal

### **C. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian ini adalah kualitatif dengan pendekatan sejarah dan politik. Penelitian ini berusaha menyibakkan dinamika perubahan sosial, politik, budaya dari sejarah dikotomis Ulu dan Iliran Di Sumatera Selatan, serta akan melihat di beberapa daerah yang menjadi representasi perwakilan daerah Ulu dan Iliran terutama tentang suksesor kepemimpinan dan probmatika dinamika politik lokal di era Modern. Sumber data yang menjadi pokok

---

<sup>2</sup> Dedi Irwanto, “Iliran Dan Ulu: Dikotomi Dan Dinamika Sejarah Kultural Palembang,” *Yogyakarta: Eja Publisher*, 2010.

<sup>3</sup> Mohammad Syawaludin, “Pengelolaan Sistem Sosial Marga Di Sumatera Selatan: Telaah Atas Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons,” *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2016): 175–98.

<sup>4</sup> Dedi Irwanto, “Historiografi Dan Identitas Ulu Di Sumatera Selatan,” *MOZAIK HUMANIORA* 18, no. 2 (2018): 157–66.

<sup>5</sup> M Din Syamsuddin, “Islam Dan Kepemimpinan Orde Baru” (Jakarta, logos, 2001).

<sup>6</sup> Abd Rachman Abror, *Pantun Melayu, Titik Temu Islam Dan Budaya Lokal Nusantara* (LKIS PELANGI AKSARA, 2009).

<sup>7</sup> Usman Usman, “ISLAM DAN POLITIK (Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer Di Indonesia),” *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2018): 75–85.

<sup>8</sup> Haryanto Haryanto, “Elit Politik Lokal Dalam Perubahan Sistem Politik,” *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 13, no. 2 (2009): 131–48.

<sup>9</sup> Taslim Batubara, “Teori Evolusi Budaya Dalam Perspektif Sejarah” 3, no. 1 (2022): 56–65.

materi dalam penelitian ini dibagi menjadi dua, Primer dan Sekunder. Sumber Primer berasal dari hasil wawancara dan observasi dilingkungan penelitian, tepatnya di daerah Kota Pagar Alam, Semendo, Kota Palembang, dan sebagian kabupaten Muara Enim, sedangkan data Sekunder diperoleh dari sumber pustaka dalam hal ini buku buku. Kemudian untuk mengumpulkan data-data lapangan yang dibutuhkan menggunakan tiga cara, yaitu melalui wawancara, Observasi, Dokumentasi. Ketika data sudah terkumpul maka metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah

#### **D. HASIL DAN PEMBAHASAN**

##### **1. KULTUR SOSIAL MASYARAKAT MARGA ULUAN DAN ILIRAN**

Karakteristik masyarakat setiap daerah berbeda-beda dan dari setiap perbedaan akan menampilkan identitas mereka masing-masing, dan hal tersebut menjadi suatu hal pembeda yang terkadang menjadi kebanggaan yang dimiliki oleh setiap daerah. Karakteristik yang beranekaragam sudah disematkan dan dikenal kepada Negara Indonesia, ratusan suku bangsa membentuk pola hidup mereka dengan bahasa dan cara hidup mereka masing-masing. Karakteristik yang lahir di tengah masyarakat memiliki banyak faktor pendorongnya, mulai dari faktor demografi wilayah, sosial Politik, dll. Oleh karena itu dalam bab ini akan memulai mengurai tentang keadaan masyarakat Marga Uluan dan Iliran mulai dari faktor dasar pembentuk masyarakat itu sendiri. Provinsi Sumatera Selatan menjadi salah satu Provinsi terbesar di Pulau Sumatera memiliki sejarah panjang terutama perkembangan tentang pemerintahan, dimulai dari system kerajaan hingga saat ini, karena bukti membuktikan bahwa pada abad 7-12 terdapat kerajaan Sriwijaya yang dapat menguasai daerah maritim terkuat di Indonesia (mengacu pada Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kerajaan maritim dan sangat berpengaruh sampai Formosa dan Cina di Asia serta Madagaskar di Afrika).<sup>10</sup>

Sumatera Selatan yang tersohor dengan banyak daerahnya terdiri dari beberapa sungai besar, hal tersebut terbukti pada banyak masyarakat lain yang mengenal nama lain dari Sumatera Selatan sebagai Batanghari Sembilan, karena ada sungai-sungai yang menjadi media transportasi utama yang dapat digunakan masyarakat untuk berlayar dari Ulu ke Ilir, 9 sungai tersebut adalah Batanghari Leko, dan Lalan, lematang, Musi, Ogan Komering, serta puluhan cabang-cabangnya. Sejarah panjang Provinsi Sumatera Selatan tidak terlepas dari tahap demi tahap yang telah dilewati masyarakat itu sendiri sehingga apa yang terjadi saat ini juga terpengaruh dari apa yang terjadi di masa lalu.

Masyarakat Iliran dapat direpresentasikan dengan melihat masyarakat Palembang, Sejak tahun

---

<sup>10</sup> <https://sumselprov.go.id> (diakses September 16, 2021)

1852, Karsidenan Palembang dibagi dalam lima daerah, yang pada zaman colonial disebut Afdeeling: ber ibukota di Palembang, dan di topang beberapa daerah lain seperti Ogan Komering Ulu (OKU), Enim, Semendo, Makakau, dan Kisam), Rawas, dan Jambi, Tebing Tinggi (Ampat Lawang dan Lematang Ulu) <sup>11</sup>

## **2. PEMERINTAHAN TRADISIONAL MASYARAKAT ULUAN DAN ILIRAN**

Pembagian antara Uluan dan Iliran yang dikatakan menarik adalah adanya aspek pembagian yang sudah tidak sesuai dengan pembagian geografis semata, karena aspek lain seperti ekonomi, sosial, politik dianggap sebagai salah satu pemisah yang begitu kentara antara uluan dan iliran. Banyak orang berprasangka bahwa Palembang merupakan representasi dari daerah Iliran dengan alasan faktor geografisnya, sedangkan daerah Uluan mencakup daerah yang lebih luas yang berada di luar geografis Ibukota, namun semakin lama dikotomis perbedaan tersebut tidak hanya melulu tentang perbedaan geografis saja, namun aspek aspek lainnya juga menjadi pembeda antar masyarakat Ulu dan Ilir. Wilayah ilir hanya diidentikkan dengan geografis tunggal yakni ibukota Palembang saja, sementara wilayah-wilayah ulu merupakan wilayah luas, yang terletak diluar ibukota. Persoalan lain, ulu yang semula sebagai konsep geografis ini, dilekatkan juga pada konsep-konsep lain dalam tataran kehidupan di Sumatera Selatan. Konsep ulu masuk ke dalam konsep-konsep lain, baik bersifat politis, ekonomis, budaya dan sosial yang selalu dihadapkan dengan konsep ilir. Ulu secara geografis merupakan wilayah multietnik dengan adat -istiadat dan budaya yang berbeda satu sama lain pada masing-masing tempat. Namun ulu sebagai konsep identitas seolah mengerucut dianggap hanya satu entitas semata, identitas tunggal<sup>12</sup>

Seperti yang dikatakan sebelumnya pemisahan antara Ulu dan Ilir tidak hanya tentang perbedaan geografis semata, namun lebih dari itu. Contohnya masyarakat Uluan Beberapa daerah Uluan yang memiliki karakteristik cukup kental dan menarik untuk dibahas terutama dalam dinamika politik lokal adalah, Pagar Alam, Muara Enim dan daerah lainnya yang memiliki identitas adat istiadat dan berbagai macam kebudayaan yang dapat membentuk masyarakat dan akan berimplikasi pada dinamika politik pada suatu daerah. Beberapa daerah yang dirasa memiliki identitas tersendiri, terutama dalam hal pemerintahan tradisional adalah daerah Pagar Alam. Masyarakat Pagar alam memiliki pemerintahan Tradisional yang di sebut Lampik Empat Mardike Duwe, sistem ini merupakan bagaimana para masyarakat Pagar alam

---

<sup>11</sup> Fera Yuliana Dewi, "Digital\_128745-T 22703 Desentralisasi Daerah," 2008.

<sup>12</sup> Irwanto, "Historiografi Dan Identitas Ulu Di Sumatera Selatan."

dahulu menjalankan roda pemerintahan tradisionalnya, baik mulai dari pembentukan hingga dinamika suksesor pemilihan kepemimpinan. Sejarah perkembangan pemerintahan tradisional di Basemah tidak bisa dilepaskan dari pengaruh Kesultanan Palembang, yang memiliki peran penting yang cukup besar dalam memberikan pengaruh kepada daerah-daerah yang memiliki sistem tradisional juga. Bagaimana Palembang dianggap sangat berperan terhadap pemerintahan tradisional di Sumatera Selatan, karena pada era tersebut Kesultanan Palembang Merupakan Epicentrum pusat pemerintahan Tradisional di Sumatera Selatan, sehingga daerah-daerah lainnya dianggap sebagai “cabang” perpanjangan tangan kesultanan Palembang. Kesultanan Palembang di posisikan sebagai ibukota yang tidak hanya menjadi pusat kekuasaan namun hal-hal lain juga menjadikan kesultanan Palembang sebagai referensi. Hal ini semakin menunjukkan bagaimana Kesultanan Palembang memerankan peran yang sangat penting guna mengatur hajat hidup masyarakat yang ada di sekitarnya juga.<sup>13</sup>

Potret saling menguasai antar satu daerah dengan daerah lainnya sangat terlihat begitu nyata pada zaman dahulu, dan hal tersebut merupakan consensus yang telah disepakati oleh semua pihak dan dijalankan sesuai dengan kaidah yang mereka ciptakan sendiri, walaupun ada keberatan dari beberapa pihak hal tersebut hal yang wajar dan biasa terjadi dalam tata kelola pemerintahan. Setiap daerah uluan memiliki peran masing-masing dalam mendukung Kesultanan Palembang, selain adanya daerah kepungutan ada daerah lain yang memiliki peran cukup dominan dalam “menyokong” pemerintahan kesultanan Palembang, daerah tersebut lebih dikenal dengan nama daerah Sindang, bila ditelaah secara epistemologi Sindang merupakan daerah perbatasan dan di analisis lebih jauh, sindang merupakan daerah pedalaman kerajaan jadi pembatas dengan daerah-daerah lain. Wilayah Sindang memiliki keistimewaan tersendiri bila dibandingkan dengan daerah lainnya, wilayah tapal batas dianggap sebagai daerah yang “berat”, oleh karena itu kesultanan Palembang di wilayah sindang tidak dapat memaksakan kehendaknya terutama kekuasaan secara absolute dan memberikan tekanan secara berlebih kepada masyarakat di daerah tersebut, karena kerajaan menganggap warga daerah Sindang memiliki kelebihan sebagai daerah penjaga tapal batas sehingga benar benar harus diistimewakan agar kekuatan daerah perbatasan dapat terus kondusif. Dengan asumsi tersebut wilayah sindang dianggap sebagai masyarakat penjaga kedaulatan daerah yang harus diberikan hak istimewa.

Selain pagar alam ada beberapa daerah lain yang termasuk dalam daerah uluan di Sumatera Selatan, salah satunya adalah Semende. Semende menjadi salah satu bagian tak terpisahkan bila harus berbicara masalah pemerintahan tradisional. Masyarakat Semende

---

<sup>13</sup> <https://palembang.go.id/> (diakses pada tanggal, diakses Juli 10, 2021)

memiliki sejarah panjang terkait tata kelola masyarakat/pemerintahan secara tradisional. Kepemimpinan Tradisional Semende pada dasarnya lebih kedalam kepemimpinan keluarga yang banyak diketahui oleh masyarakat umum, hanya orang-orang tertentu saja yang mengetahui tentang Kepemimpinan Adat Semende secara umum. Perlu diketahui bahwa Kepemimpinan Tradisional Semende mempunyai dua bentuk sistem kepemimpinan yaitu, Kepemimpinan Adat Semende secara umum yang dipimpin oleh Pesirah dan Kepemimpinan Adat Semende dalam kepemimpinan keluarga di kelola oleh Meraje, Di jelaskan di atas bahwa Kepemimpinan Tradisional Semende dipimpin oleh Pesirah dan dua wakilnya serta stap pembantu yang diduduki oleh Meraje.

Kepemimpinan Tradisional Semende bergabung dengan lembaga pemerintahan karena Krie merupakan bawahan dari Pesirah, Lembaga Kepemimpinan Tradisional Semende merupakan suatu lembaga hukum dan pengadilan serta pimpinan tertinggi di masyarakat adat semende meskipun tidak ada teks yang tertulis dan hanya merupakan kata-kata yang diturunkan dari nenek moyang, terkait tentang hukum adat semende.

Berbicara masalah iliran di Sumatera Selatan pasti langsung merujuk kepada daerah Kota Palembang, Kota Palembang dianggap sebagai representasi daerah iliran yang paling tepat, karena iliran di analogikan sebagai daerah yang telah maju pesat dalam berbagai aspek kehidupannya, namun dibalik itu semua ada sejarah panjang yang sangat menarik untuk di elaborasi lebih mendalam.

Basis kepemimpinan tradisional yang berkembang di Sumatera Selatan lebih mengarah kepada basis teori kepemimpinan tradisional. Weber berpendapat bahwa, Otoritas Tradisional merupakan suatu otoritas yang dimiliki seorang pemimpin karena adanya hubungan keluarga dengan pemimpin terdahulu dari para pengikutnya, sehingga para pengikut yang telah mempunyai kepatuhan terhadap pemimpinnya terdahulu secara otomatis akan mengikuti dan patuh terhadap otoritas yang dibuat oleh pemimpin mereka yang baru (Weber, 1921/1968: 223)<sup>14</sup>. mayoritas suksesor kepemimpinan berdasarkan asas turun temurun dan yang sesuai dengan garis darah, walaupun tidak menutup kemungkinan dalam prosesnya otoritas karismatik pun juga akan dilabelkan dari setiap tipe kepemimpinan yang di emban oleh sang pemimpin tradisional dalam kelompok masyarakat tertentu, tinggal bagaimana mempertanyakan eksistensi ini dalam bingkai demokrasi yang sedang dijalankan di Negara kita.

---

<sup>14</sup> Faqih Muhdyanto, Sigit Pranawa, and Okta Hadi Nurcahyono, "Analisis Teori Otoritas Max Weber Dalam Kepemimpinan Dukun Adat Di Masyarakat Suku Tengger (Studi Kasus Tentang Kepemimpinan Lokal Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur)," *Jurnal Pend. Sos Ant* 8, no. 1 (2017): 1–18, <https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/12715>.

### **3. MARGA DALAM LINGKARAN (KEBIJAKAN ) POLITIK**

Setiap kelompok masyarakat memiliki entitas masing-masing yang tercermin dalam perilaku kehidupan sehari-hari, entitas setiap masyarakat juga berdampak ataupun dampak dari peristiwa politik tertentu. Masyarakat tradisional pun tidak terlepas dengan dinamika politik tertentu, lahirnya masyarakat baru terkadang merupakan akibat dari dinamika politik, karena sejarah mencatat bahwa ada pola pemerintahan tradisional yang hilang karena hegemoni pemerintahan nasional yang absolute. Apa yang terjadi saat ini mulai memudarnya pemerintahan tradisional tidak terlepas dari dinamika politik yang terjadi selama ini, karena setiap rezim pemerintahan yang berkuasa memiliki pola pengaturan pemerintahan yang bermacam-macam, sehingga eksistensi dari beberapa pola pemerintahan tradisional ini sedikit banyak mulai tergerus dengan akan adanya pemerataan dalam sistem pemerintahan di Indonesia, tercatat hanya ada beberapa sistem pemerintahan yang diakui dan masih eksis saat ini, dan tidak sedikit pula yang hilang di telan oleh aturan pemerintahan pusat. Beberapa Aturan telah mengurangi eksistensi pemerintahan tradisional terutama pasca dikeluarkannya UU No 5 tahun 1979. UU tersebut sedikit banyak mereduksi “kekuatan” tradisional di daerah-daerah dalam melanggengkan karakteristik “ke tradisional” di masing-masing daerah. Reduksi kekuatan tradisional bagian ini lebih melihat pada bagaimana setiap rezim pemerintahan memiliki setiap alasan untuk mengintervensi setiap pemerintahan yang ada dibawahnya, karena hierarki tercipta agar supaya pemerintahan yang berada di tingkat teratas hierarki dapat mengatur institusi yang ada dibawahnya, bahkan lebih jauh dapat mendikte semua kehendak yang diinginkan oleh pemerintah yang paling atas. Dampak yang dapat terlihat di beberapa daerah adalah hilangnya ciri khas terutama tata kelola pemerintahan yang mengakomodir keadaan masyarakat yang ada di daerah tersebut, terkhusus hal tersebut juga terjadi di Sumatera Selatan dengan alasan penyeragaman dan kesetaraan. Sumatera Selatan yang terdiri dari banyak pemerintahan tradisional sedikit banyak terkena imbas atas beberapa kebijakan yang ada dari pemerintahan, dimana dijelaskan sebelum ini bahwa setiap era pasti memiliki kebijakannya masing-masing.

Ada momentum dimana pemerintahan Sumatera Selatan menggerus adat istiadat yang telah berlangsung cukup lama. Dihapusnya sistem pemerintahan marga di Sumatera Selatan melalui Surat Keputusan (SK) Gubernur Sumatera Selatan No.142/KPTS/III/1983 yang berisi penghapusan sistem marga di Sumatera Selatan. Bunyi pembubaran sistem marga di Sumatera Selatan, Pesirah dan instrumen marga dipecah dengan hormat, dusun di dalam marga diganti dengan desa sesuai dengan definisi yang ada pada UU No.5/1979. Krie sebagai kepala dusun

diganti menjadi kepala desa yang akan di tunjuk melalui pemilihan kepala desa sesuai dengan UU No.5/1979. Dengan adanya Surat Keputusan Gubernur Sumatera Selatan No.142/KPTS/III/1983 tentang penghapusan sistem Marga merupakan suatu kekeliruan yang luar biasa terhadap Hak Asasi Manusia masyarakat Adat (Marga), karena sistem marga ini merupakan salah satu jati diri masyarakat adat tersebut dimana ketika keluar Surat Keputusan tersebut maka jati diri masyarakat adat telah dicabut secara paksa.

Salah satu daerah yang dapat menggambarkan tentang bagaimana suatu kebijakan dapat merubah tatanan kehidupan masyarakat secara seketika, hal tersebut tidak menutup kemungkinan akan terjadi di era saat ini maupun yang akan datang, oleh karena itu selalu valid mengatakan bahwa politik merupakan hal yang sangat dinamis dan tidak statis, kekuatan sebesar apapun dapat dengan mudah berganti dengan kekuatan yang lainnya juga. Dalam hal ini teori perubahan kebudayaan apa yang terjadi pada masyarakat Ulu dan ilir dan di Sumatera Selatan sedikit banyak sesuai dengan apa yang dikemukakan oleh Turner Dalam pandangan proses evolusi sosial universal, semua masyarakat dipandang berevolusi<sup>15</sup> dari tingkat yang sederhana ke tingkat yang makin lama makin tinggi dan kompleks. Proses berevolusi ini mesti dialami oleh setiap masyarakat di muka bumi ini. Yang membedakan antar yang satu dengan lainnya adalah tingkat percepatan evolusi tersebut<sup>16</sup>Oleh karena itu, pada bagian-bagian kecil budaya masyarakat, masih ada yang terlihat seperti belum banyak berubah dari zaman sejak manusia timbul di muka bumi. Ada perubahan atau evolusi yang dilakukan oleh masyarakat dengan cakupan yang luas, namun dalam konteks kasus ini evolusi masyarakat yang ada, terpengaruh/terdampak oleh kebijakan pemerintah pusat.

#### **4. Kontribusi Islam dan Politik Lokal**

Berbicara tentang politik tidak hanya berkuat pada kontestasi politik pada saat pemilu saja, namun lebih dari itu. Politik sangat luas cakupannya dan sangat memungkinkan untuk disandingkan dan bahkan terhubung baik secara sengaja ataupun tidak sengaja terhadap disiplin ilmu lainnya, terutama apabila lebih dikerucutkan ke arah cakupan yang lebih sempit lagi. *Scope* (cakupan) politik yang lebih kecil tidak menjamin politik itu akan terlihat lebih mudah, namun justru sebaliknya Politik dalam lingkup kecil sangat memungkinkan untuk menyeret kajian disiplin ilmu lainnya dalam pembahasannya.

Penganut agama Islam yang menjadi mayoritas di Indonesia memiliki peran yang cukup

---

<sup>15</sup> Turner, "Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern."

<sup>16</sup> Koentjaraningrat, *Sejarah Teori Antropologi* (Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1990).

vital dari semua perkembangan keadaan masyarakat di Indonesia, baik itu lewat individu ataupun organisasi-organisasi Islam yang berperan aktif dalam proses kenegaraan, baik organisasi yang telah lahir di era awal kemerdekaan atau organisasi yang hadir seiring berbagai macam dinamika perkembangan era di Indonesia. Mereka membawa misi masing masing dalam gerakan yang mereka lakukan sesuai dengan ideology yang mereka percayai sebagai landasan mereka dalam berfikir dan berorganisasi. Banyak suara sumbang ketika pembahasan tentang agama dan politik “jangan campur adukkan agama dengan politik, namun sejarah berbicara sebaliknya, banyak tinjauan sejarah yang menggambarkan bahwa politik sangat sulit dijauhkan dari agama. Berbicara konteks di Indonesia yang mayoritas masyarakat beragama Islam yang terdapat berbagai macam organisasi agama sedikit banyak pasti akan berpengaruh pada pemerintahan yang sedang berjalan.

Perkembangan Islam di Indonesia telah dimulai bahkan pada masa pra colonial walaupun perkembangannya tidak terlalu pesat karena masih ada agama lainnya yang juga memiliki basis pengikut cukup banyak, yaitu Hindu dan budha. Namun seiring berjalannya waktu Islam menjadi agama mayoritas yang ada di Indonesia dan hal tersebut selaras dan berjalan beriringan dengan perkembangan Indonesia yang sedang di jajah. Pemanfaatan agama sebagai komoditas politik dan memberikan legitimasi “pembenaran” pada politisi tertentu sangat mudah ditemui saat ini, Sebab, dari agamalah para politisi mencoba memusatkan perhatian dalam pengertian mencari legitimasi mereka, baik secara langsung ataupun tidak.

Agama dipergunakan sebagai sumber legitimasi bagi ketajaman-ketajaman moral dan keputusan-keputusan terhadap rakyat, yang merupakan basis dari masyarakat Indonesia. Dengan berbagai asumsi tentang relevansi pembahasan seberapa penting pembahasan agama dan Negara, setidaknya ada tiga pemikiran berpandangan bagaimana keadaan yang terjadi antara Negara dan Agama di era saat ini. (1) pemikiran yang menghendaki keterpisahan agama dari sistem ketatanegaraan atau sekularisme; (2) wacana yang melihat agama dan negara bersifat komplementer; dan (3) wacana yang bercorak integralistik. <sup>17</sup>Dari ketiga kerangka berpikir tersebut sangat mudah kita temukan dalam realita Negara kita saat ini, dimana hal tersebut merupakan hal yang wajar ketika konsep tersebut dapat disalurkan dengan cara yang santun tanpa memaksakan pola pikir mereka untuk diterima pihak manapun.

Wacana tentang islam dan Negara akan terus berlanjut dan bukan tidak mungkin akan memanas di moment-moment tertentu. Oleh karena itu perlu adanya jalan tengah yang tepat guna mengakomodir semua kepentingan, karena seharusnya tidak menganaktirikan warga minoritas

---

<sup>17</sup> Usman, “ISLAM DAN POLITIK (Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer Di Indonesia).”

dan diharapkan mayoritas tidak merasa jumawa. Harus ada sifat saling mengisi antara keduanya Yakni adanya peluang bagi agama-agama untuk mengisi dimensi etis dari kehidupan bernegara dan moralitas agama, sehingga rumusan “Negara Indonesia bukanlah negara agama bukan pula negara sekuler”, tetapi negara yang di dalamnya nilai-nilai agama-agama bisa hidup dan eksis

#### **E. KESIMPULAN**

Pembahasan yang komprehensif tentang dialektika antara uluan dan iliran telah dipaparkan dan didapati beberapa kesimpulan yaitu. Masyarakat Uluan dan Iliran merupakan Pembagian antara uluan dan iliran yang dikatakan menarik adalah adanya aspek pembagian yang sudah tidak sesuai dengan pembagian geografis semata, karena aspek lain seeperti ekonomi, sosial, politik dianggap sebagai salah satu pemisah yang begitu kentara antara uluan dan iliran, dan hal tersebut merupakan adat yang akan secara simultan dibawa dalam kehidupan sehari-hari, dan akan diturunkan secara berjangka di tengah masyarakat. Kedua Kesimpulan yang dapat diambil dari pemaparan tentang beberapa tipe kepemimpinan tradisional di marga uluan masih sangat identik dengan tipe otoritas tradisional yang diungkapkan oleh Webber, dimana mayoritas suksesor kepemimpinan berdasarkan asas turun temurun dan yang sesuai dengan garis darah, walaupun tidak menutup kemungkinan dalam prosesnya otoritas karismatik pun juga akan dilabelkan dari setiap tipe kepemimpinan yang di emban oleh sang pemimpin tradisional dalam kelompok masyarakat tertentu, tinggal bagaimana mempertanyakan eksistensi ini dalam bingkai demokrasi yang sedang dijalankan di Negara kita. Kesimpulan selanjutnya wacana tentang islam dan Negara akan terus berlanjut dan bukan tidak mungkin akan memanas di moment-moment tertentu. Oleh karena itu perlu adanya jalan tengah yang tepat guna mengakomodi. Harus ada sifat saling mengisi antara keduanya Yakni adanya peluang bagi agama-agama untuk mengisi dimensi etis dari kehidupan bernegara dan moralitas agama, sehingga rumusan “Negara Indonesia bukanlah negara agama bukan pula negara sekuler”, tetapi negara yang di dalamnya nilai-nilai agama-agama bisa hidup dan eksis. Dalam konteks lokal agama masih akan menjadi primadona bagi para politisi lokal untuk menarik simpati dan mendapatkan suara, baik melalui wacana wacana yang mengedepankan agama ataupun penggunaan symbol symbol yang akan semakin marak dalam berbagai macam media kampanye

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Abror, Abd Rachman. *Pantun Melayu, Titik Temu Islam Dan Budaya Lokal Nusantara*. LKIS PELANGI AKSARA, 2009.

- Batubara, Taslim. "Teori Evolusi Budaya Dalam Perspektif Sejarah" 3, no. 1 (2022): 56–65.
- Dewi, Fera Yuliana. "Digital\_128745-T 22703 Desentralisasi Daerah," 2008.
- Haryanto, Haryanto. "Elit Politik Lokal Dalam Perubahan Sistem Politik." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik* 13, no. 2 (2009): 131–48.
- Irwanto, Dedi. "Historiografi Dan Identitas Ulu Di Sumatera Selatan." *MOZAIK HUMANIORA* 18, no. 2 (2018): 157–66.
- . "Iliran Dan Uluan: Dikotomi Dan Dinamika Sejarah Kultural Palembang." *Yogyakarta: Eja Publisher*, 2010.
- Koentjaraningrat. *Sejarah Teori Antropologi*. Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), 1990.
- Muhdyanto, Faqih, Sigit Pranawa, and Okta Hadi Nurcahyono. "Analisis Teori Otoritas Max Weber Dalam Kepemimpinan Dukun Adat Di Masyarakat Suku Tengger (Studi Kasus Tentang Kepemimpinan Lokal Desa Ngadiwono, Kecamatan Tosari, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur)." *Jurnal Pend. Sos Ant* 8, no. 1 (2017): 1–18.  
<https://jurnal.fkip.uns.ac.id/index.php/sosant/article/view/12715>.
- Syamsuddin, M Din. "Islam Dan Kepemimpinan Orde Baru." Jakarta, logos, 2001.
- Syawaludin, Mohammad. "Pengelolaan Sistem Sosial Marga Di Sumatera Selatan: Telaah Atas Kontribusi Teori Fungsionalisme Struktural Parsons." *Jurnal Sosiologi Reflektif* 10, no. 1 (2016): 175–98.
- Turner, Bryan S. "Teori Sosial Dari Klasik Sampai Postmodern." *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2012.
- Usman, Usman. "ISLAM DAN POLITIK (Telaah Atas Pemikiran Politik Kontemporer Di Indonesia)." *Al Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan* 6, no. 1 (2018): 75–85.